

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap Muslim berupaya mewujudkan kualitas penghambaan yang sempurna melalui ketaatan terhadap seluruh ketentuan Allah Swt. serta menjauhi segala larangan-Nya. Dalam konteks tersebut, Qur'an dan Hadis menjadi landasan yang memuat berbagai perintah dan larangan dalam kehidupan umat Islam. Ajaran pokok yang terkandung di dalamnya ialah rukun Islam dan rukun iman, yang keduanya menjadi pondasi praktik keagamaan. Salah satu rukun yang wajib diimani bagi umat muslim adalah melaksanakan haji. Haji merupakan rukun islam yang diwajibkan bagi orang yang mampu (Q.S. 3: 97).

Haji adalah rukun Islam yang kelima dan memiliki kewajiban bagi umat muslim yang telah memenuhi ketentuan istitha'ah. Ketentuan tersebut mencakup kesiapan finansial, kondisi fisik yang memadai, serta kemandirian mental, yang artinya seseorang harus sehat badan dan jiwa serta mempunyai kemampuan ekonomi untuk membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bagi dirinya sendiri dan memastikan keberlangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan, tanpa terhalang oleh hambatan administratif atau kebijakan perjalanan haji.

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memerlukan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan profesional. Kompleksitas pelaksanaan ibadah haji, menuntut adanya

sistem manajemen yang efisien dan berintegritas. Dalam hal ini, aspek pengelolaan keuangan, khususnya terkait dana setoran awal jemaah haji atau BPIH, menjadi krusial untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan serta meningkatkan kualitas pelayanan haji di Indonesia.

Pengelolaan dana haji di Indonesia mengalami transformasi kelembagaan yang signifikan. Pada tahap awal, Kementerian Agama mengelola seluruh dana haji sebagai bagian dari fungsi pelayanan publik. Namun, meningkatnya jumlah jemaah, akumulasi dana setoran awal yang terus bertambah, serta tuntutan tata kelola yang lebih profesional mendorong lahirnya Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) sebagai entitas khusus yang berfokus pada pengelolaan dana tersebut.

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yang menjadi landasan hukum pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Lembaga ini resmi beroperasi pada tahun 2017 dan mengambil alih fungsi pengelolaan keuangan haji dari pemerintah, dengan model tata kelola yang lebih independen, profesional, dan berbasis prinsip *good governance*.

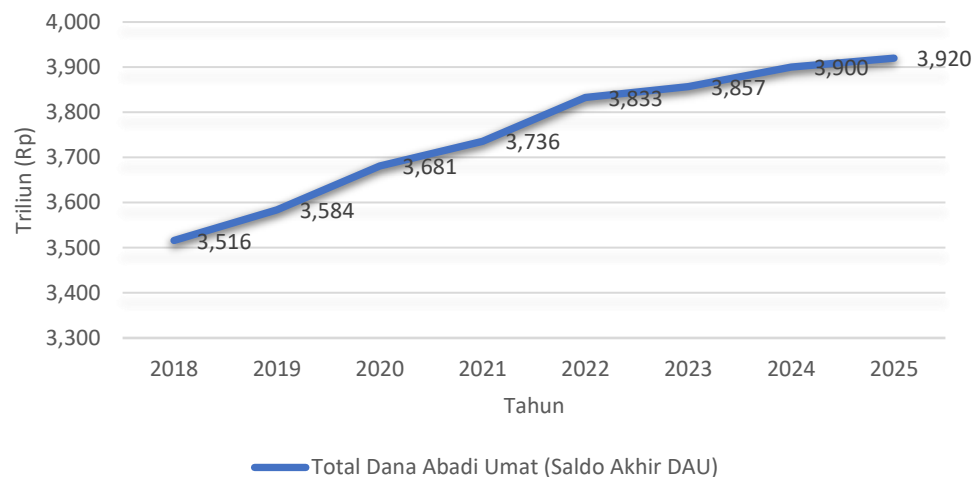
Sebagai institusi publik yang berdiri secara independen, BPKH memegang tanggung jawab strategis untuk menjamin bahwa dana yang dibayarkan oleh calon jemaah haji terlindungi dengan baik serta dikelola secara menyeluruh dalam seluruh aspek keuangan haji. Pengelolaan tersebut mencakup penerimaan setoran awal dari calon jemaah hingga upaya peningkatan nilai manfaat melalui kegiatan investasi yang terencana dan terukur. Semua tahapan ini bertujuan

menjamin tata kelola ibadah haji yang berkualitas. Fokus utamanya adalah mengoptimalkan aspek pelayanan sekaligus memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi umat muslim di Indonesia.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan sekaligus penempatan investasi atas Dana Abadi Umat (DAU) pada beragam instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Instrumen tersebut meliputi surat berharga syariah, emas, investasi langsung, serta berbagai produk keuangan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Dana Abadi Umat (DAU) merupakan salah satu instrumen keuangan publik keagamaan yang memiliki peran strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi umat melalui mekanisme pengelolaan dana abadi umat berdasarkan prinsip syariah. Pengelolaan DAU diatur dan diawasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengelola dana haji dan program kemaslahatan. Secara global, pengelolaan dana keagamaan menunjukkan kecenderungan meningkatkan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas sesuai dengan praktik tata kelola yang baik di lembaga keuangan publik (Wongtschowski dkk., 2016). Hal ini didukung dengan sistem *Controlling* yang lebih diukur untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan program kemaslahatan (Zulkarnain, 2025).

Total Dana Abadi Umat (Saldo Akhir DAU)



Gambar 1.1 Grafik Total Dana Abadi Umat (DAU)

Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan BPKH Tahun 2018-2025

Berdasarkan perkembangan Dana Abadi Umat selama periode 2018 hingga 2025, terlihat bahwa nilai pokok dana terus mengalami peningkatan dari sekitar Rp3,516 triliun menjadi sekitar Rp3,92 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa BPKH mampu menjaga keberlanjutan Dana Abadi Umat melalui pengelolaan investasi yang menghasilkan nilai manfaat secara berkesinambungan.

Program kemaslahatan adalah manifestasi dari implementasi manfaat Dana Abadi Umat (DAU) melalui berbagai kegiatan. Berdasarkan P BPKH No. 3 Tahun 2023, program ini mencakup enam bidang utama: pelayanan ibadah haji, sosial keagamaan, pendidikan dan dakwah, tanggap bencana, kesehatan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah. Karakter program ini bersifat terstruktur dan berbasis regulasi, sehingga berbeda dari filantropi umum; ia bergerak dalam kerangka tata kelola negara dengan

mekanisme penetapan prioritas, persetujuan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Besarnya dana yang disalurkan setiap tahun mencerminkan kemampuan BPKH dalam mengelola hasil pengembangan Dana Abadi Umat menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penyaluran Dana Program Kemaslahatan



Gambar 1.2 Grafik Penyaluran Dana Program Kemaslahatan

Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan BPKH Tahun 2018-2025

Meskipun demikian, perkembangan penyaluran Dana Program Kemaslahatan selama periode 2018-2025 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada beberapa tahun, penyaluran mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sedangkan pada tahun lainnya justru mengalami penurunan meskipun nilai Dana Abadi Umat terus bertambah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya penyaluran program tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan Dana Abadi Umat, tetapi juga oleh kebijakan pengelolaan nilai manfaat, mekanisme pengendalian, prioritas program, serta strategi BPKH dalam menjaga

keberlanjutan dana. Oleh karena itu, peningkatan jumlah Dana Abadi Umat perlu diimbangi dengan pelaksanaan fungsi *Controlling* yang efektif agar nilai manfaat yang dihasilkan dapat disalurkan secara optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang maksimal terhadap efektivitas Program Kemaslahatan.

Seiring berjalannya waktu, nilai pokok DAU yang dikelola semakin besar dan target program kemaslahatan dalam Rencana Strategis BPKH tahun 2021-2025 semakin meningkat (BPKH, 2024). Tantangan utama BPKH juga tidak hanya berkaitan dengan efisiensi investasi, tetapi juga efektivitas dalam mendistribusikan manfaat melalui program kemaslahatan umat sesuai secara adil dan tepat sasaran, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) (BPKH, 2024). Dalam observasi penulis, ada beberapa program kemaslahatan yang belum tepat sasaran, seperti program ternak, dan pengadaan mobil operasional. Selain itu, tekanan publik dan media terhadap transparansi lembaga ini meningkat, mencerminkan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pertanggungjawaban moral dan keuangan (Pambayun dkk., 2025). Dengan demikian, indikator *Controlling* menjadi elemen kunci untuk memastikan bahwa pengelolaan dana umat dapat efektif secara sosial.

Penelitian terdahulu terkait pengelolaan Dana Abadi Umat umumnya bersifat deskriptif atau kualitatif, menyoroti konsep akuntabilitas, tata kelola dan mekanisme pengelolaan DAU secara umum. Salah satunya adalah artikel yang menganalisis pengelolaan DAU oleh BPKH di Indonesia yang menggambarkan tujuan pengelolaan untuk menjaga keamanan, akuntabilitas

dan efektivitas dalam mencapai kemaslahatan umat (Fitriyani dkk., 2023). Namun, penelitian ini tidak menganalisis secara kuantitatif peran *Controlling* terhadap efektivitas program kemaslahatan. Penelitian lain, seperti tesis yang meneliti efektivitas pengelolaan DAU di tingkat daerah, menunjukkan bahwa program berjalan terarah dan berkelanjutan tetap masih menghadapi kendala operasional (Mafluhah, 2025).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa pengaruh *Controlling* terhadap efektivitas program kemaslahatan pada tahun 2025. Secara teoritis, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian tentang tata kelola keuangan publik keagamaan, memperluas pemahaman tentang hubungan antara manajemen kinerja, penyaluran nilai manfaat dari Dana Abadi Umat (DAU) dan efektivitas program berbasis masalah. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi referensi strategis bagi BPKH, Kementerian Haji RI, serta lembaga pengelola dana umat lainnya dalam merumuskan sistem *Controlling* yang lebih komprehensif, transparan, dan berkelanjutan.

Dengan meningkatnya kompleksitas pengelolaan DAU (Dana Abadi Umat) untuk program kemaslahatan serta tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas, penelitian ini penting untuk dilakukan. *Controlling* terhadap efektivitas program kemaslahatan sangat penting agar setiap rupiah dana umat dapat memberikan manfaat maksimal dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik dan bertujuan untuk melakukan penelitian tentang

Pengaruh *Controlling* terhadap Efektivitas Program Kemaslahatan Berbasis Dana Abadi Umat Tahun 2025.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *Controlling* pada program kemaslahatan berbasis dana abadi umat tahun 2025 di BPKH?
2. Bagaimana efektivitas program kemaslahatan berbasis dana abadi umat tahun 2025 di BPKH?
3. Bagaimana pengaruh *Controlling* terhadap efektivitas program kemaslahatan berbasis dana abadi umat tahun 2025 di BPKH?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan *Controlling* pada program kemaslahatan berbasis dana program kemaslahatan berbasis dana abadi umat tahun 2025 di BPKH.
2. Untuk menganalisis efektivitas program kemaslahatan berbasis dana abadi umat tahun 2025 di BPKH.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Controlling* dengan efektivitas program kemaslahatan berbasis dana abadi umat tahun 2025 di BPKH.

1.4 Kegunaan Penelitian

Selaras dengan apa yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini bermaksud memberikan kontribusi dan manfaat baik untuk kegunaan akademis ataupun kegunaan praktis.

1.4.1 Secara Akademis

Sebagai referensi bagi mahasiswa Manajemen Haji dan Umrah khususnya di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati, sebagai sumbangsi pemikiran untuk bahan kajian terkhusus pada mata kuliah berbasis kemanajemenan yang di sajikan pada prodi manajemen haji dan umrah, kemudian menjadi bahan rujukan bagi skripsi-skripsi selanjutnya, dan untuk menambah wawasan, pengetahuan, serta pemahaman mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana haji, bagi peneliti maupun pembaca.

1.4.2 Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi BPKH dan mitra kemaslahatan terkait dalam pengelolaan Dana Abadi Umat dan program kemaslahatan. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan dan gambaran dalam memperkuat sistem *Controlling* berbasis kinerja agar efektivitas program kemaslahatan meningkat secara terukur. Penelitian ini diharapkan dapat difungsikan sebagai bahan pendukung dan pelengkap bagi penelitian selanjutnya serta sebagai upaya memperkaya literatur ilmiah.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Landasan Teori

1.5.1.1 *Controlling*

Penelitian ini menggunakan perspektif *Management Control System* dari Anthony & Govindarajan (2007). Dalam teori tersebut, *Controlling* merupakan proses pengendalian yang memastikan aktivitas berjalan sesuai rencana, standar, dan target. *Controlling* tidak hanya mencatat aktivitas, tetapi mengamati apakah pelaksanaan program berada pada jalur yang ditetapkan. Teori ini mendasari tiga dimensi *Controlling* yang digunakan dalam penelitian:

1) *Strategic Control* (Pengendalian Strategis)

Pengendalian strategis berfungsi untuk menegaskan bahwa strategi organisasi tetap relevan, selaras dengan visi-misi, dan mampu menjawab perubahan lingkungan.

Dalam pandangan Anthony & Govindarajan, pedoman yang nyata mengenai apa yang seharusnya dicapai hanya dapat dimiliki jika organisasi mempunyai pengendalian yang strategis.

2) *Management Control* (Pengendalian Manajerial)

Management Control berfungsi untuk memastikan bahwasanya semua sumber daya digunakan secara tepat sasaran dalam pelaksanaan program. Dalam dimensi ini, fokus utamanya adalah kinerja pegawai, pencapaian program dan efektivitas manajemen.

3) *Operational Control* (Pengendalian Operasional)

Pengendalian operasional digunakan untuk mencegah adanya penyimpangan operasional serta untuk mengawasi pelaksanaan teknis program. Dalam hal ini, pengendalian operasional berfokus pada kepatuhan terhadap SOP, ketepatan waktu dan ketertiban administrasi.

1.5.1.2 Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan yang memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat keberhasilan suatu usaha maupun tindakan nyata. Efektivitas menunjukkan sejauh mana ketercapaian dan realisasi dari suatu tujuan strategis yang telah ditetapkan secara terukur sebelumnya. Konsep efektivitas mengacu pada parameter keberhasilan yang substantif serta pemenuhan sasaran organisasi secara optimal.

Variabel efektivitas menggunakan teori *Goal Attainment* dari Amitai Etzioni (1964). Efektivitas menurut Etzioni adalah sejauh mana organisasi mencapai tujuannya secara optimal, dilihat dari kualitas, ketepatan, dan keberlanjutan hasil. Penelitian ini menggunakan tiga dimensi efektivitas yang sejalan dengan model Etzioni:

1) *Goal Achievement*

Goal achievement menilai apakah hasil program sesuai target yang ditetapkan. Etzioni menekankan bahwa efektivitas dinilai dari pencapaian tujuan yang terukur.

2) *Efficiency*

Efisiensi menunjukkan tingkat optimalisasi pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam literatur efektivitas, efisiensi adalah kemampuan mencapai hasil dengan biaya, waktu, dan tenaga minimal.

3) *Sustainability*

Sustainability digunakan untuk mengukur keberlanjutan manfaat. Dalam konteks program kemaslahatan yang berbasis nilai manfaat DAU, keberlanjutan merupakan indikator utama efektivitas jangka panjang.

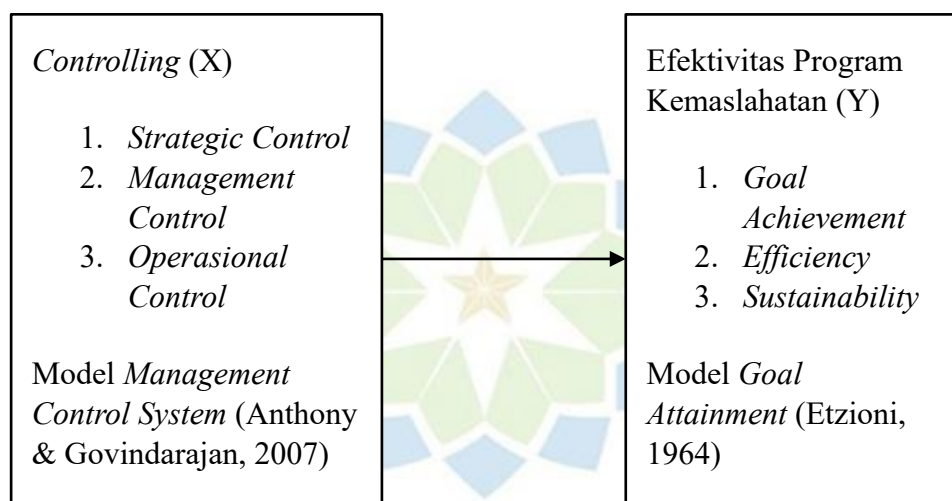
1.5.1.3 Program Kemaslahatan

Program Kemaslahatan adalah rangkaian kegiatan sosial-keagamaan dan pemberdayaan umat yang didanai dari nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU) yang telah diurus oleh BPKH. Pendanaan ini tidak menyentuh pokok DAU, melainkan hanya hasil pengembangannya, sehingga program dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengurangi dana inti jangka Panjang (Hendarsa dkk., 2014).

Program Kemaslahatan dipahami sebagai instrumen kemanfaatan publik yang menghubungkan pengelolaan keuangan haji dengan peningkatan kesejahteraan umat. Sebagai konsep, ia mengemban mandat *maqāṣid syariah* untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan kemaslahatan umum melalui intervensi yang bersifat edukatif, sosial, dan ekonomi. Kemaslahatan diposisikan bukan hanya sebagai “bantuan”,

tetapi sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat kualitas hidup umat Islam melalui intervensi yang terukur, akuntabel, dan berdampak luas, dengan transparansi penggunaan nilai manfaat DAU sebagai pondasi tata kelolanya.

1.5.2 Kerangka Konseptual



Gambar 1.3 Kerangka Konseptual

Sumber: Peneliti

Controlling berperan sebagai mekanisme pengendalian internal yang melekat dalam desain manajemen modern. Anthony & Govindarajan menggambarkan sebagai proses yang memastikan bahwa aktivitas pelaksanaan berjalan sesuai rencana, standar, dan target. Pada level operasional, *Controlling* diharapkan mampu membantu pelaksanaan program agar lebih terarah dan sesuai target. Ketika *Controlling* berjalan dengan baik, kesalahan dapat dideteksi lebih cepat, deviasi dapat dikoreksi, dan sumber daya dapat digunakan lebih efisien.

Efektivitas program kemaslahatan menurut Etzioni akan tercapai ketika tujuan program terpenuhi dengan kualitas, ketepatan waktu, dan dampak keberlanjutan yang sesuai. Efektivitas dalam konteks kemaslahatan mencakup indikator seperti ketepatan sasaran penerima manfaat, efisiensi pemanfaatan nilai manfaat DAU, kualitas capaian program pada enam bidang pelayanan haji, dakwah, kesehatan, sosial-keagamaan, ekonomi umat, dan sarana ibadah), serta kepuasan pemangku kepentingan. Variabel Y merupakan hasil dari proses kontrol menyeluruh: monitoring memastikan kualitas proses, evaluasi menjamin kualitas hasil.

Hubungan antarvariabel bergerak dalam pola yang saling menguatkan. *Controlling* memberikan data dan informasi real-time tentang pelaksanaan program. Dengan demikian, kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan bahwa pelaksanaan *controlling* dalam Program Kemaslahatan berhubungan dengan efektivitas program yang dijalankan oleh BPKH.

1.5.3 Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan, yaitu:

- 1) Variabel X (bebas) : *Controlling*
- 2) Variabel Y (terikat) : Efektivitas

Tabel 1.1. Operasional Variabel

Variabel	Teori	Dimensi	Indikator	Alat Ukur
<i>Controlling</i> (X ₁)	Anthony & Govindarajan (2007)	<i>Strategic Control</i>	1. Kesesuaian tujuan program 2. Kebijakan strategis yang jelas 3. Evaluasi tujuan strategis	Skala Likert (1-5)
		<i>Management Control</i>	1. Pengendalian Perencanaan dan Penganggaran Program 2. Pemantauan Pelaksanaan Program 3. Evaluasi kinerja program	Skala Likert (1-5)
		<i>Operational Control</i>	1. Kepatuhan terhadap SOP 2. Pengendalian Perilaku Mitra Pelaksana 3. Keteraturan Pelaporan Operasional	Skala Likert (1-5)
Efektivitas Program (Y)	Etzioni (1964)	<i>Goal Achievement</i>	1. Tingkat Keberhasilan Indikator Output	Skala Likert (1-5)

			2. Realisasi terhadap Rencana Kerja	
		<i>Efficiency</i>	1. Pemanfaatan Dana dan Waktu 2. Optimalisasi Biaya Operasional	Skala Likert (1-5)
		<i>Sustainability</i>	1. Peningkatan Kesejahteraan Penerima Manfaat 2. Persepsi Masyarakat terhadap Manfaat Program	Skala Likert (1-5)

Sumber: Peneliti

1.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu proposisi teoretis atau dugaan logis sementara sementara mengenai hubungan antarvariabel yang diteliti. Hipotesis dalam penelitian kuantitatif terdiri atas Hipotesis Nol (H_0) serta Hipotesis Alternatif (H_1). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hubungan *Controlling* (X) dengan Efektivitas Program Kemaslahatan (Y).

- H_0 : Tidak terdapat hubungan antara *Controlling* dengan efektivitas Program Kemaslahatan Berbasis Dana Abadi Umat tahun 2025 di BPKH.
- H_1 : Terdapat hubungan antara *Controlling* dengan efektivitas Program Kemaslahatan Berbasis Dana Abadi Umat tahun 2025 di BPKH.

1.7 Langkah-Langkah Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Lt. 15, Muamalat Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio No. Kav. 18, Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta.

1.7.2 Paradigma dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan *Controlling* dan efektivitas Program Kemaslahatan melalui pengukuran variabel menggunakan instrumen kuesioner dan analisis statistik. Paradigma positivisme merupakan cara pandang yang menempatkan realitas sebagai sesuatu yang objektif, tetap, dapat diukur, dan dapat dijelaskan melalui hubungan. Creswell (2014) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif berakar pada pandangan positivistik, di mana peneliti berupaya menguji teori menggunakan variabel yang dapat diukur serta menganalisis data melalui prosedur statistik.

Peneliti menerapkan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan *Controlling* serta efektivitas program kemaslahatan dalam konteks pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) tahun 2025 berdasarkan persepsi responden serta didukung oleh data dokumentasi pendukung.

1.7.3 Metode Penelitian

Metode survei digunakan sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan data kuantitatif. Metode survei dipilih karena dapat mengukur persepsi responden secara sistematis dalam populasi kecil namun homogen, dengan tujuan untuk menganalisis hubungan *controlling* dan efektivitas program kemaslahatan berdasarkan persepsi responden.

Menurut Creswell (2016), metode survei adalah strategi penelitian yang bertujuan mengumpulkan data kuantitatif dari sampel representatif dengan menyebarkan kuesioner atau wawancara terstruktur sebagai bagian dari pengumpulan data, yang hasilnya dapat digunakan untuk memperoleh gambaran empiris berdasarkan persepsi responden. Dalam konteks ini, penelitian akan menggunakan kuesioner berbasis skala Likert yang dibagikan kepada responden yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program kemaslahatan BPKH, seperti pegawai BPKH dan mitra pelaksana.

1.7.4 Jenis Data dan Sumber Data

1.7.4.1 Jenis Data

Pengumpulan data kuantitatif umumnya berbentuk angka diukur secara objektif. Data-data kemudian dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi pola atau keterkaitan antar berbagai variabel yang diteliti sehingga menghasilkan informasi yang valid. Data kuantitatif mencakup data seperti angka-angka atau skala yang digunakan untuk mengukur hubungan dan kondisi variabel *Controlling* terhadap efektivitas program kemaslahatan di BPKH.

1.7.4.2 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari responden sebagai sumber data utama melalui penyebaran kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator pada setiap variabel penelitian, yaitu *Controlling* dan efektivitas program kemaslahatan. Data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif numerik, berupa skor hasil pengisian skala Likert dengan rentang 1–5, mencerminkan tingkat persepsi atau penilaian responden terhadap pernyataan dalam kuesioner.

Penggunaan data primer bertujuan untuk memperoleh informasi faktual dan aktual dari pelaku lapangan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program kemaslahatan. Menurut Creswell (2016), data primer memiliki keunggulan karena dikumpulkan langsung oleh peneliti sesuai dengan tujuan dan variabel penelitian, sehingga tingkat keaslian dan relevansinya lebih tinggi. Melalui kuesioner, peneliti dapat mengukur persepsi dan pengalaman empiris para responden terkait pelaksanaan *Controlling* serta dampaknya terhadap efektivitas program. Dengan demikian, data yang diperoleh mencerminkan kondisi nyata pelaksanaan program kemaslahatan di lingkungan BPKH dan dapat dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapat dari berbagai dokumen resmi BPKH seperti Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kemaslahatan BPKH tahun 2024 serta laporan monitoring dan evaluasi program kemaslahatan tahun 2025.

Data sekunder digunakan untuk memperkuat konteks dan validitas analisis dengan memberikan gambaran makro mengenai tata kelola Dana Abadi Umat. Menurut Saunders dkk. (2019), data sekunder berfungsi sebagai pelengkap yang penting karena dapat digunakan untuk melakukan triangulasi, memverifikasi hasil temuan lapangan, dan memberikan dasar pembandingan terhadap data primer.

1.7.5 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2019), populasi dalam penelitian kuantitatif harus ditentukan berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengukur hubungan antar variabel secara empiris. Oleh karena itu, seluruh individu yang berperan dalam sistem pelaksanaan dan pengawasan program kemaslahatan menjadi sasaran utama, karena mereka memiliki pengalaman langsung terhadap penerapan *Controlling* yang menjadi variabel utama penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai dan mitra pelaksana yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kemaslahatan di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Karakteristik utama populasi ini adalah mereka yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta

monitoring dan evaluasi (*Controlling*) program kemaslahatan. Populasi tersebut berjumlah 30 orang, terdiri dari pegawai bidang kemaslahatan dan mitra pelaksana program. Mengingat jumlah populasi yang relatif terbatas, penelitian ini menggunakan metode sensus (*total sampling*), yaitu teknik pengambilan sampel yang melibatkan seluruh anggota populasi sebagai responden. Metode ini dipilih karena populasi memiliki ukuran yang kecil, serta seluruh anggotanya memenuhi kriteria yang relevan untuk menilai variabel penelitian. Kriteria tersebut antara lain: (1) memiliki jabatan atau fungsi yang terkait langsung dengan pelaksanaan program kemaslahatan, dan (2) memahami mekanisme *Controlling* di lingkungan BPKH.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik melalui penyebaran kuesioner, dokumentasi, dan observasi lapangan selama pelaksanaan magang di BPKH. Pendekatan survei dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian kuantitatif yang berfokus pada pengumpulan data dalam bentuk numerik dan pengukuran hubungan antarvariabel secara objektif (Creswell, 2016). Kuesioner digunakan untuk memperoleh data primer dalam waktu yang relatif singkat, serta memungkinkan dilakukannya analisis statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jenis data kuesioner yang dikumpulkan bersifat kuantitatif, berupa skor numerik dari jawaban responden terhadap pernyataan dalam kuesioner dengan skala Likert lima poin (1 = sangat tidak setuju hingga 5 = sangat setuju) sebagai berikut:

Tabel 1.2 Nilai Skala Likert

No	Pernyataan	Singkatan	Bobot
1	Sangat Setuju	SS	5
2	Setuju	S	4
3	Netral	N	3
4	Tidak Setuju	TS	2
5	Sangat Tidak Setuju	STS	1

Sumber: Peneliti

Setiap butir pernyataan disusun secara sistematis berdasarkan indikator pada masing-masing variabel penelitian yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya. Menurut Sekaran & Bougie (2019), skala Likert adalah alat ukur efektif untuk menggambarkan persepsi, sikap, dan penilaian responden terhadap fenomena tertentu secara terukur. Oleh karena itu, metode ini sangat sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi hubungan *Controlling* terhadap efektivitas program kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

1.8 Validitas dan Reliabilitas

1.8.1 Validitas Instrumen

Validitas merupakan tingkat ketepatan suatu instrumen dalam mengukur konstruk atau variabel yang menjadi sasaran pengukuran (Sugiyono, 2019). Dengan demikian, instrumen yang valid mampu

mengukur variabel penelitian secara akurat sesuai dengan konsep teoretis yang mendasarinya. Dalam penelitian ini, uji validitas berfungsi untuk memastikan setiap butir pernyataan pada kuesioner telah sesuai dan mampu merepresentasikan indikator dari masing-masing variabel *Controlling* dan Efektivitas Program Kemaslahatan secara tepat. Uji validitas dilakukan melalui pendekatan validitas konstruk (*construct validity*).

Validitas konstruk berfungsi untuk menilai sejauh mana seluruh butir pernyataan dalam instrumen mampu menjelaskan konstruk teoretis yang diukur. Pengujian validitas konstruk pada penelitian ini dilakukan menggunakan analisis korelasi *Product Moment Pearson*, dengan mengorelasikan skor setiap butir pernyataan dengan skor total variabel. Adapun rumus korelasinya sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N\sum X^2 - (\sum X)^2][N\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Kriteria pengujian validitas adalah:

- a) Item pernyataan dinyatakan valid apabila nilai r hitung melebihi r tabel pada taraf signifikansi 0,05.
- b) Item pernyataan dinyatakan tidak valid apabila nilai r hitung lebih kecil atau sama dengan r tabel, sehingga perlu direvisi atau dihapus dari instrumen penelitian.

Dengan demikian, hanya item-item yang memiliki nilai korelasi signifikan dan tinggi yang akan digunakan dalam analisis penelitian.

1.8.2 Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas menunjukkan tingkat kesesuaian suatu instrumen secara konsisten dalam menghasilkan data apabila digunakan berulang kali pada kondisi yang sama (Ghozali, 2018). Instrumen yang reliabel memiliki tingkat kesalahan pengukuran yang rendah dan menunjukkan stabilitas hasil antar waktu.

Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha* (α) untuk mengukur tingkat konsistensi internal antarbutir pernyataan dalam satu variabel. Adapun rumus *Cronbach's Alpha* adalah sebagai berikut:

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Keterangan:

k = total item pernyataan

σ_i^2 = varians setiap item

σ_t^2 = varians total

Kriteria reliabilitas menurut (Nunnally & Bernstein, 1994):

$\alpha \geq 0,90$ = Sangat reliabel

$0,70 \leq \alpha < 0,90$ = Reliabel

$0,60 \leq \alpha < 0,70$ = Cukup reliabel

$\alpha < 0,60$ = Tidak reliabel

Dalam penelitian sosial, nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $\geq 0,60$ masih dianggap memenuhi kriteria reliabilitas, terutama pada penelitian yang

bersifat eksploratif atau melibatkan jumlah responden yang terbatas (Ghozali, 2018). Maka, dengan nilai tersebut, instrument dinyatakan reliabel dan layak untuk pengumpulan data penelitian.

Instrumen penelitian dinyatakan memiliki reliabilitas yang baik dan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data apabila hasil pengujian menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70.

1.9 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial sederhana, yaitu pendekatan analisis yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan mengenai hubungan antarvariabel berdasarkan data numerik yang diperoleh dari responden. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengukuran hubungan antara variabel independen (*Controlling*) dan variabel dependen (Efektivitas Program Kemaslahatan), sehingga diperlukan analisis statistik untuk menganalisis hubungan yang dihipotesiskan secara empiris (Sugiyono, 2019). Analisis statistik inferensial berfungsi untuk menguji hipotesis penelitian dengan menerapkan model statistik yang sesuai dengan karakteristik data dan tujuan penelitian, sebagai berikut:

1.9.1 Uji Asumsi Klasik

Data terlebih dahulu diuji sebelum analisis regresi dilakukan untuk memastikan bahwa data telah memenuhi asumsi dasar dalam analisis statistik parametrik, yaitu:

- (1) Uji Normalitas (menggunakan *Shapiro Wilk Test*) untuk memastikan distribusi data normal.
- (2) Uji Heteroskedastisitas untuk memastikan varian residual bersifat konstan (dapat diuji dengan metode Glejser).

1.9.2 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linier sederhana merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selain menguji hubungan tersebut, metode ini juga dapat digunakan untuk memperkirakan nilai variabel dependen berdasarkan perubahan atau nilai variabel independen yang telah diketahui. Adapun persamaan regresi linier sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Efektivitas Program Kemaslahatan

X = *Controlling*

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

Hasil analisis regresi ini akan menunjukkan:

- (1) Besarnya hubungan variabel independen terhadap variabel dependen (nilai β),
- (2) Arah hubungan (positif atau negatif),

(3) Signifikansi hubungan (melalui uji t sebagai pengujian parsial).

1.9.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Nilai R^2 yang semakin mendekati angka 1 menunjukkan bahwa model regresi memiliki kemampuan yang semakin baik dalam merepresentasikan hubungan atau kaitan antara variabel independen dan variabel dependen.

1.9.4 Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Uji t berfungsi untuk mengetahui hubungan antar variabel *Controlling* dengan efektivitas Program Kemaslahatan secara parsial berdasarkan hasil analisis regresi sederhana.

Kriteria pengambilan keputusan:

Jika $Sig < 0,05 \rightarrow$ hubungan signifikan.

Jika $Sig \geq 0,05 \rightarrow$ hubungan tidak signifikan.

b. Uji F (Simultan)

Uji F berfungsi untuk menguji signifikansi model regresi secara menyeluruh, yaitu untuk menilai apakah variabel independen memberikan pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini, uji F diterapkan untuk menilai signifikansi model regresi yang menjelaskan pengaruh variabel *Controlling* terhadap Efektivitas Program Kemaslahatan.

H0: tidak terdeteksi adanya variabel bebas yang mampu mempengaruhi variabel terikat.

H1: terdeteksi adanya variabel bebas yang mampu mempengaruhi variabel terikat.

